

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan syariat Islam, namun di dalam rumah tangga tidak selamanya berjalan mulus, banyak juga rumah tangga yang mengalami permasalahan atau pertengkaran yang berakhir pada perceraian. Perceraian merupakan alternatif terakhir yang ditempuh oleh pasangan suami isteri yang tidak mampu mencapai kebahagiaan yang kekal yang sesuai dengan tujuan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 *juncto* No. 45 Tahun 1990 dan akibat hukum putusan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada putusan Nomor 0099/Pdt.G/2018/PA.Kds.

Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk data primer dilakukan dengan wawancara dan untuk data sekunder dengan cara membaca, mengkaji, dan menganalisis, bahan-bahan kepustakaan. Metode analisa data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah (1) Syarat perceraian bagi PNS menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 *juncto* Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 di Pengadilan Agama Kudus sama dengan perceraian yang bukan PNS, yang menjadi perbedaan adalah PNS harus melampirkan surat izin dari atasannya dan jika PNS tidak dapat melampirkan surat izin dari atasannya selama 6 bulan namun PNS tetap ingin melanjutkan tuntutannya, maka PNS harus membuat surat pernyataan bahwa ia akan menanggung segala resiko yang akan terjadi setelah putusnya perkara tersebut tanpa ada melibatkan pihak pengadilan. (2) Akibat hukum putusan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada perkara Nomor 0099/Pdt.G/2018/PA. Kds adalah sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Penggugat tidak berhak atas sebagian gaji dari bekas suaminya karena perceraian ini dilakukan atas kehendak istri sendiri, Akibat terhadap anak berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan semua biaya pemeliharaan dan pendidikan ditanggung oleh bapaknya. Dan kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak. Akibat terhadap harta bersama seperti yang sudah ditentukan dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta benda diatur hukumnya masing-masing.

Kata Kunci : Syarat perceraian, Akibat hukum putusan perceraian, PNS (Pegawai Negeri Sipil).

ABSTRACT

Marriage is a bond between a man and a woman in order to form a happy and prosperous family in accordance with Islamic law, but in the household it does not always run smoothly, many households also experience problems or arguments that end in divorce. Divorce is the last alternative taken by a married couple who are unable to achieve eternal happiness that is suitable for the purpose of marriage. This study aims to determine the conditions for divorce for Civil Servants (PNS) according to Government Regulation No. 10 of 1983 juncto No. 45 of 1990 and the legal consequences of divorce decisions for Civil Servants (PNS) in the decision Number 0099 / Pdt.G / 2018 / PA.Kds.

The method used is a normative juridical method, with descriptive analytical research specifications. The data used are primary data and secondary data which includes primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection methods used for primary data are carried out by interviews and for secondary data by reading, studying and analyzing library materials. Data analysis method uses qualitative analysis.

The results of this study are (1) Divorce requirements for civil servants according to Government Regulation No. 10 of 1983 juncto Government Regulation No. 45 of 1990 in the Holy Religious Court with divorce that is not a civil servant, the difference is that civil servants must attach a letter of permission from their superiors and if civil servants cannot attach a letter of permission from their superiors for 6 months, civil servants still want to continue their demands. statement that he will bear all risks that will occur after the termination of the case without involving the court. (2) Legal consequences of divorce decisions for Civil Servants in case Number 0099 / Pdt.G / 2018 / PA. KDS is in accordance with Article 8 of Government Regulation No. 45 of 1990 concerning the permission of Marriage and Divorce Civil Servants The plaintiff is not entitled to part of the salary of his ex-husband because the divorce was carried out on his own wife's wishes, As a result of the child based on Article 41 letter (b) Law No. 1 of 1974 concerning Marriage all maintenance and education costs are borne by his father. And both parents are obliged to care for and educate children. As a result of the joint assets as stipulated in Article 37 of the Marriage Law, that if the marriage is terminated due to divorce, then the property is governed by their respective laws.

Keywords: *Terms of divorce, Legal consequences of divorce decisions, Civil Servants (Civil Servants).*